Evaluasi Penatausahan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga DIY

Oleh :

Wahyu Puji Nugroho

5130111429

Tahap penatausahaan barang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY adalah melalui proses pembukuan, inventarisasi dan kemudian melakukan pelaporan mengenai pengelolaan barang. Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan unsur yang penting yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah karena Barang Milik Daerah merupakan barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan barang milik daerah dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pengelolaan barang milik daerah (BMD). Penatausahaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan BMD yang melaksanakan kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD. Dengan penatausahaan secara tertib, maka akan dihasilkan angka-angka yang tepat dan akurat yang berdampak pada tersedianya database yang memadai dalam menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengamanan administrasi BMD, dan akan menghasilkan laporan aset daerah di neraca dengan angka yang tepat dan akurat selanjutnya pengguna barang akan melaporkan kepada Pengelola Barang (Sekertaris Daerah). Kemudian akan disusun Daftar Barang Milik Daerah. Dalam penggolongan barang dilakukan pengkodefikasian baerdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2016 penelitian di lakukan apakah proses pengkodefiaksian barang sudah sesuai dengan peraturan tersebut. Dan dalam penatausahaan Barang Milik Daerah juga di gunakan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang proses pembukuan pelaporan dan juga inventarisasi. Dari hasil analisis yang dilakukan berdasarkan peraturan tersebut dalam proses inventarisasi barang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY ditemukan beberapa hal terutama dan pengkodefikasian barang pada Dinas tersebut belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2016. Kesimpulan ini didapat dari proses analisis data yang di peroleh dengan membandingkannya dengan Peraturan Pemerintahan yang berlaku.

Kata kunci : Penatausahaan, Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 tahun 2016, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY

*Evaluation of Regional Property Administration at the DIY Youth and Sports Education Office*

*Wahyu Puji Nugroho*

*5130111429*

*The stage of administration of goods at the DIY Youth and Sports Education Agency is through the bookkeeping process, inventory and then reporting on goods management. Management of Regional Property is an important element that is the concern of the Regional Government because Regional Property is goods purchased or obtained at the expense of the Regional Budget (APBD) or derived from other legitimate acquisitions. Therefore, the regional government must manage regional property well and can be accounted for in the form of regional property management reports (BMD). Administration of regional property is part of BMD management that carries out bookkeeping, inventory and BMD reporting activities. With orderly administration, precise and accurate numbers will be generated which have an impact on the availability of adequate databases in preparing needs and budgeting planning, BMD administration security, and will produce reports on regional assets in the balance sheet with the right and accurate figures then the users of goods will report to the Property Manager (Regional Secretary). Then a list of regional property will be prepared. In classifying goods, the coding based on Minister of Home Affairs Regulation No. 108 In 2016 the research was conducted whether the process of coding the goods was in accordance with these regulations. And in administering Regional Property also Government Regulation No. 27 of 2014 concerning the reporting process of reporting and inventory. From the results of the analysis carried out based on these regulations in the process of inventory of goods at the DIY Youth and Sports Education Service, several things were discovered mainly and the coding of goods on the Office was not in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 108 of 2016. This conclusion is obtained from the data analysis process obtained by comparing it with the prevailing Government Regulations.*

*Keywords: Administration, Regional Property, Minister of Home Affairs Regulation No. 108 of 2016, DIY Education for Youth and Sports*